

---

**KONSTRUKSI MAKNA UPAH LAYAK: STUDI KUALITATIF BERBASIS LITERASI KEUANGAN PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI**

Insya May Nika Yulfa<sup>1</sup>, Revalisa Matriana<sup>2</sup>, Siti Nurohmah<sup>3</sup>, Fianeka Kuning Ardelia<sup>4</sup>, Nina Farliana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Semarang

Email: [insyamaynika@students.unnes.ac.id](mailto:insyamaynika@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [revalisaamatriana@students.unnes.ac.id](mailto:revalisaamatriana@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sitinurohmah270605@students.unnes.ac.id](mailto:sitinurohmah270605@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [kuningfianeka@students.unnes.ac.id](mailto:kuningfianeka@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>,  
[ninafarliana@mail.unnes.ac.id](mailto:ninafarliana@mail.unnes.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara standar upah minimum dengan realitas kebutuhan hidup layak yang ada di Indonesia, rendahnya tingkat literasi keuangan mahasiswa yang berpotensi memengaruhi persepsi mereka terhadap upah layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi makna upah layak pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi berbasis literasi keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang dipilih secara purposive, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai upah layak tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek sosial, pengembangan diri, dan tabungan masa depan. Literasi keuangan berperan penting dalam membentuk persepsi yang lebih realistis terhadap standar upah layak, meskipun pengaruh media sosial dapat menyebabkan distorsi persepsi pada sebagian mahasiswa. Selain itu juga, ditemukan adanya kesadaran kritis mengenai perbedaan antara upah minimum dan upah layak. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan ekonomi dan literasi keuangan, serta menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kurikulum yang lebih kontekstual dan relevan.

**Kata Kunci:** Upah Layak, Literasi Keuangan, Mahasiswa, Konstruksi Makna, Pendidikan Ekonomi.

**Abstract:** This study is motivated by the gap between the minimum wage standard and the actual cost of a decent living in Indonesia, as well as the relatively low level of financial literacy among university students, which may influence their perceptions of a living wage. The purpose of this study is to analyze the construction of the meaning of a living wage among Economic Education students based on financial literacy. This research employs a qualitative approach with a descriptive phenomenological design. Data were collected through in-depth interviews with ten students from Universitas Negeri Semarang who were selected purposively, and then analyzed using thematic analysis techniques. The findings reveal that students perceive a living wage not merely as the fulfillment of basic needs, but also as encompassing social aspects, self-development, and future savings. Financial literacy plays a crucial role in shaping more realistic perceptions of living wage standards; however, the influence of social media may lead to

*distorted perceptions among some students. In addition, the study identifies a critical awareness among students regarding the distinction between minimum wage and living wage. This study contributes to the development of research in economic education and financial literacy, and also serves as a reference for curriculum evaluation to make it more contextual and relevant.*

**Keywords:** *Living Wage, Financial Literacy, Students, Meaning Construction, Economic Education.*

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan pekerja merupakan isu sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya terpecahkan. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03% pada 2024, rata-rata upah bersih pekerja Indonesia per Februari 2025 hanya berada di angka Rp3,09 juta per bulan, sementara rata-rata upah minimum provinsi (UMP) nasional 2025 tercatat Rp3,31 juta (BPS, 2025). Lebih memprihatinkan, sekitar 53% karyawan Indonesia masih menerima gaji di bawah UMP yaitu hanya sebesar 47% yang benar-benar memperoleh penghasilan di atas batas minimum resmi (BPS, 2025). Kesenjangan ini menjadi paradoks tersendiri di tengah ambisi Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Data BPS (2025) lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan menghasilkan disparitas upah yang signifikan, sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rata-Rata Upah Bersih Pekerja Indonesia Menurut Tingkat Pendidikan (2024)

<b>Kelompok</b>	<b>Literasi Keuangan (%)</b>	<b>Inklusi Keuangan (%)</b>
Pegawai/Profesional	>80%	95,04%
Pengusaha/Wiraswasta	>70%	85,40%
Pelajar/Mahasiswa	56,42%	79,00%
Tidak/Belum Bekerja	42,18%	55,10%
Petani/Peternak/Nelayan	<60%	62,26%

Sumber: BPS, Keadaan Pekerja di Indonesia Februari 2025

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pekerja dengan pendidikan di bawah diploma masih berada di bawah UMP, sedangkan lulusan perguruan tinggi relatif lebih terlindungi. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu posisi tawar seseorang dalam pasar kerja, sekaligus menjadi alasan mengapa mahasiswa sebagai calon pekerja terdidik perlu memiliki pemahaman yang tepat tentang upah layak sejak dini.

Pemerintah telah menetapkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai acuan resmi yang mencakup 64 komponen mulai dari pangan, sandang, papan, kesehatan, hingga tabungan (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, 2020). Makna "layak" itu sendiri bersifat relatif, diperdebatkan, dan bergantung pada sudut pandang siapa yang berbicara. Upah layak bukan sekadar angka, melainkan sebuah konstruk sosial yang terbentuk dari pengetahuan, nilai, pengalaman, dan kondisi sosial-ekonomi seseorang (Berger & Luckmann, 1966).

Isu ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan mahasiswa Pendidikan Ekonomi, yang mengemban tanggung jawab ganda seperti memahami upah layak untuk kepentingan mereka sebagai calon pekerja sekaligus untuk diajarkan kepada siswa kelak. Namun, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (Keuangan & Statistik, 2024) mencatat indeks literasi keuangan kelompok pelajar dan mahasiswa hanya sebesar 56,42% dimana angka ini merupakan angka terendah kedua setelah kelompok tidak/belum bekerja (OJK & BPS, 2024) seperti yang terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Indeks Literasi Keuangan Indonesia Menurut Kelompok Pekerjaan (SNLIK 2024)

<b>Kelompok</b>	<b>Literasi Keuangan (%)</b>	<b>Inklusi Keuangan (%)</b>
Pegawai/Profesional	>80%	95,04%
Pengusaha/Wiraswasta	>70%	85,40%
Pelajar/Mahasiswa	56,42%	79,00%
Tidak/Belum Bekerja	42,18%	55,10%
Petani/Peternak/Nelayan	<60%	62,26%

Sumber: OJK & BPS, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024

Tabel 2 menunjukkan kesenjangan literasi keuangan yang cukup tajam antara mahasiswa (56,42%) dengan pegawai atau profesional (>80%). Padahal, literasi keuangan dipahami sebagai kemampuan memahami dan menggunakan pengetahuan keuangan secara efektif dalam pengambilan keputusan (Lusardi & Mitchell, 2014). Herawati (2015) menemukan bahwa literasi keuangan mahasiswa berkorelasi positif dengan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi, sementara Suwatno et al. (2020) menunjukkan bahwa peningkatannya secara langsung memengaruhi perilaku keuangan. Tanpa fondasi literasi keuangan yang kuat, mahasiswa berisiko membentuk persepsi tentang upah layak yang tidak realistis.

Beberapa penelitian terdahulu menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan topik ini, namun belum ada yang secara langsung membahas konstruksi makna upah layak dari perspektif mahasiswa berbasis literasi keuangan. Gultom et al. (2022) mengkaji pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi

dengan temuan yang signifikan, tetapi tidak menyentuh persepsi upah layak. Mulyadi et al. (2022) meneliti kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi tanpa mengkaji konstruksi makna upah. Ariska et al. (2023) menghubungkan literasi keuangan dengan perilaku keuangan mahasiswa tanpa mengaitkannya dengan standar upah layak. Dari sisi kebijakan, Oktawila (2025) dan Izzaty (2013) menggunakan pendekatan normatif-yuridis serta data kuantitatif, sehingga dimensi persepsi subjektif mahasiswa tidak terjangkau. Setidaknya terdapat empat celah yang perlu diisi yaitu: pertama, kajian literasi keuangan mahasiswa selama ini terpusat pada perilaku konsumsi, bukan pembentukan persepsi upah layak; kedua, penelitian upah layak di Indonesia didominasi pendekatan kuantitatif sehingga dimensi subjektifnya nyaris tidak tersentuh; ketiga, mahasiswa Pendidikan Ekonomi sebagai calon pendidik strategis belum pernah dijadikan subjek kajian makna upah layak; keempat, pendekatan kualitatif yang mengungkap kedalaman konstruksi makna masih sangat jarang diterapkan dalam kajian pengupahan di Indonesia.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menawarkan studi kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis tematik. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi pemahaman mahasiswa tentang konsep upah layak; (2) menganalisis bagaimana dimensi literasi keuangan dan pengetahuan, sikap, dan perilaku untuk membentuk konstruksi makna tersebut; (3) mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi cara mahasiswa memaknai upah layak; serta (4) menggambarkan kesenjangan antara konstruksi makna mahasiswa dengan standar regulasi pengupahan yang berlaku. Temuan ini diharapkan memperkaya kajian interdisipliner pendidikan ekonomi dan literasi keuangan, sekaligus memberikan masukan bagi evaluasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan calon pendidik yang melek finansial.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme sosial untuk melihat bagaimana makna lahir dari pengalaman dan interaksi setiap individu (Creswell & Poth, 2018). Fokus utamanya bukan untuk mengukur variabel, melainkan menggali lebih dalam bagaimana mahasiswa Pendidikan Ekonomi memaknai konsep upah layak, baik sebagai calon pekerja maupun pendidik. Desain yang dipilih adalah fenomenologi deskriptif guna mengungkap inti pengalaman dan pemahaman subjektif para partisipan (Moustakas, 1994).

Partisipan penelitian dipilih secara khusus (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan studi (Sugiyono, 2020). Kriteria tersebut mencakup mahasiswa aktif Pendidikan Ekonomi yang telah menempuh mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, serta

bersedia terlibat secara sukarela. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data, di mana pencarian informasi dihentikan saat tidak ada lagi temuan baru (Lincoln & Guba, 1985), yang biasanya tercapai pada kisaran 8–12 orang (Creswell & Poth, 2018).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang semi-terstruktur. Panduan wawancara disusun dengan memadukan dimensi literasi keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014) dan indikator upah layak sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Wawancara dilakukan secara tatap muka, direkam dengan izin partisipan, lalu diubah menjadi transkrip lengkap untuk menjaga keutuhan data.

Proses analisis data mengikuti enam tahap analisis tematik dari Braun & Clarke (2006), mulai dari memahami data secara berulang, memberikan kode nama partisipan, hingga menyusun tema dan laporan akhir. Untuk menjamin keabsahan, peneliti menerapkan member checking dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada partisipan, serta menyusun thick description agar konteks penelitian tergambar secara rinci (Lincoln & Guba, 1985). Peneliti juga melakukan refleksi diri secara terus-menerus guna meminimalkan bias selama menafsirkan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil Literasi Keuangan Mahasiswa sebagai Fondasi Konstruksi Makna**

Penelitian ini melibatkan sepuluh mahasiswa aktif dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang dipilih melalui metode purposif. Para informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti telah menempuh mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, memiliki profil literasi keuangan yang memadai berdasarkan asesmen awal, serta bersedia berpartisipasi secara sukarela. Guna menjaga kerahasiaan identitas, setiap informan diidentifikasi menggunakan kode nama partisipan MS-01 hingga DV-10, yang rincian karakteristiknya dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. Karakteristik Informan Penelitian**

<b>Nama Partisipan</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Usia</b>	<b>Angkatan</b>	<b>Semester</b>	<b>Tingkat Literasi Keuangan</b>	<b>Status Tinggal</b>	<b>Tempat Tinggal</b>
MS-01	Perempuan	22	2022	VIII	Tinggi	Kos/Perantau	
SV-02	Perempuan	22	2022	VIII	Tinggi	Kos/Perantau	
AL-03	Perempuan	21	2023	VI	Tinggi	Kos/Perantau	

---



---

FD-04	Perempuan	20	2024	IV	Sedang	<b>Kos/Perantau</b>
AS-05	Perempuan	20	2024	IV	Sedang	<b>Kos/Perantau</b>
NM-06	Perempuan	20	2024	IV	Tinggi	<b>Kos/Perantau</b>
SZ-07	Perempuan	20	2024	IV	Tinggi	<b>Kos/Perantau</b>
ER-08	Perempuan	20	2024	IV	Tinggi	<b>Kos/Perantau</b>
AF-09	Perempuan	21	2023	VI	Tinggi	<b>Kos/Perantau</b>
DV-10	Laki-laki	21	2023	VI	Tinggi	<b>Kos/Perantau</b>

---

*Sumber: Data primer penelitian, 2026*

Berdasarkan data pada Tabel 3, terlihat bahwa seluruh informan berstatus sebagai mahasiswa perantau yang tinggal di kos, sehingga mereka telah menjalani pengalaman hidup mandiri secara finansial. Kondisi ini menjadi latar belakang yang sangat relevan karena pengelolaan keuangan secara mandiri berkontribusi langsung pada pembentukan persepsi mereka mengenai upah layak. Sebagian besar informan memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, sementara dua orang lainnya berada pada kategori sedang, di mana perbedaan tingkat pemahaman ini secara konsisten tercermin dalam cara mereka mengonstruksi makna upah layak.

Tingkat kedisiplinan finansial di antara para informan menunjukkan kecenderungan yang baik meskipun cukup bervariasi. Sebagai contoh, SV-02 menegaskan bahwa disiplin anggaran adalah keharusan bagi mahasiswa perantau, sementara AL-03 telah menerapkan metode *budgeting* sejak masa SMA dan merasa perkuliahan di Pendidikan Ekonomi memperkuat pola pikir tersebut. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Gultom et al. (2022) yang menunjukkan bahwa mahasiswa Pendidikan Ekonomi cenderung memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik karena paparan materi kurikuler yang intensif, di mana literasi keuangan terbukti berpengaruh positif dan signifikan sebesar 41,4% terhadap perilaku keuangan mahasiswa.

Selain itu, kesadaran ekonomi makro juga tergambar kuat, di mana hampir seluruh informan mampu menjelaskan konsep inflasi dan menghubungkannya langsung dengan daya beli. SZ-07 bahkan merinci bahwa jika upah naik namun tidak sebanding dengan inflasi, maka pekerja akan mengalami penurunan daya beli secara riil. Kemampuan berpikir kontekstual ini mencerminkan indikator literasi keuangan fungsional yang menurut Lusardi & Mitchell (2014) membedakan individu yang mampu membuat keputusan finansial optimal dari yang tidak, di

mana pemahaman terhadap konsep inflasi dan bunga merupakan komponen mendasar dari *the Big Three* pengukuran literasi keuangan.

### 2. Konstruksi Makna Upah Layak

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh informan tidak memaknai upah layak sebatas kemampuan untuk bertahan hidup saja, melainkan sebagai standar kehidupan yang lebih komprehensif dan bermartabat. Konstruksi makna ini terbentuk melalui interaksi antara pengetahuan di kampus, pengalaman hidup mandiri, serta kesadaran ekonomi. Hal ini konsisten dengan perspektif konstruktivisme sosial dari Berger & Luckmann (1966) yang menyatakan bahwa makna dibentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial.

Pemaknaan yang paling dominan adalah upah layak sebagai pemenuhan kebutuhan secara terhormat, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. MS-01 mendefinisikannya sebagai pendapatan yang mencakup kebutuhan dasar hingga rekreasi yang wajar, sementara SZ-07 mengembangkan definisi tersebut dengan memasukkan kebutuhan untuk berkembang sebagai berikut:

*"Bagi saya upah layak itu adalah upah yang memungkinkan pekerja dan keluarganya hidup secara terhormat dan tidak hanya sekadar bertahan hidup, karena harus mencakup kebutuhan fisik, sosial, dan kebutuhan untuk berkembang seperti akses pendidikan serta tabungan masa depan." (SZ-07)*

Konseptualisasi ini sejalan dengan kerangka *living wage* yang dikembangkan oleh Anker & Anker (2017), yang secara tegas membedakan antara upah subsisten dan upah hidup layak yang mencakup pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan tabungan darurat sebagai komponen wajib. AL-03 bahkan mengaitkan definisinya secara langsung dengan kerangka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (2020) melalui penjelasan di bawah ini:

*"Upah layak bagi saya adalah upah yang secara objektif mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dan bukan sekadar subsisten, di mana saya mengacu pada konsep KHL yang mencakup pangan, kesehatan, hingga tabungan. Bukan soal kemewahan, tetapi soal standar minimal kemanusiaan." (AL-03)*

Tema lain yang konsisten muncul adalah relativitas standar upah layak, di mana informan

menyadari bahwa angka tersebut tidak dapat disamaratakan antar daerah maupun antar individu dengan jumlah tanggungan yang berbeda. Kesadaran ini mencerminkan pemahaman yang matang mengenai variasi biaya hidup di masyarakat. Selain itu, terdapat pemahaman kritis mengenai adanya celah normatif antara upah minimum dan upah layak, sebagaimana diungkapkan oleh AF-09 bahwa upah minimum merupakan batas hukum sedangkan upah layak adalah standar manusiawi. Kesadaran akan celah ini sangat penting karena dalam banyak kajian kebijakan, upah minimum sering kali dianggap identik dengan upah layak (Izzaty, 2013).

**3. Estimasi Upah Layak dan Kesenjangan dengan Standar Regulasi**

Penelitian ini juga berhasil dalam menggali angka estimasi upah layak dari sudut pandang mahasiswa. Hasilnya memperlihatkan cara berpikir yang berbasis pada data keseharian mereka sendiri, bukan hanya sekadar mengikuti angka resmi dari pemerintah.

**Tabel 4. Estimasi Upah Layak Informan dan Penilaian terhadap UMK Semarang 2025**

<b>Nama Partisipan</b>	<b>Estimasi Upah Layak</b>	<b>Dasar Penilaian</b>	<b>Penilaian terhadap UMK Semarang 2025 (±Rp3,2 juta)</b>
MS-01	Rp3,5–4,0 juta/bulan	Pengalaman hidup mandiri + komponen KHL	UMK belum cukup, terutama untuk pos tabungan dan sosial
AL-03	Lajang: Rp2,2–2,8 juta Keluarga: Rp6–8 juta	Kalkulasi rinci per komponen (kos, makan, transport, kesehatan)	UMK cukup untuk lajang, tidak untuk keluarga
NM-06	Rp2,8–3,2 juta/bulan	KHL komprehensif termasuk kesehatan dan pendidikan	UMK kurang, belum mencakup tabungan secara memadai
FD-04	Rp2,5–3,0 juta/bulan	Pengalaman hidup mandiri, asumsi dikelola baik	Cukup untuk lajang hemat, tidak untuk keluarga

---

AF-09	Minimal ada sisa tabungan	Indikator perilaku: ada tabungan setelah kebutuhan terpenuhi	UMK mendekati layak, sangat bergantung pola pengelolaan
-------	---------------------------	--	---

---

*Sumber: Data primer wawancara, 2026; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2025 (2024)*

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan adanya variasi dalam angka yang diusulkan oleh para informan. AL-03 melakukan perhitungan yang paling mendalam dengan merinci biaya tempat tinggal, makan, transportasi, hingga kesehatan. AL-03 menyimpulkan bahwa meskipun UMK Semarang mungkin cukup untuk mereka yang belum berkeluarga, angka tersebut akan sangat jauh dari kata cukup jika digunakan untuk menghidupi keluarga.

Hal yang menarik muncul dari pendapat AF-09 yang tidak menggunakan angka pasti, melainkan menggunakan sebuah indikator perilaku untuk menentukan kelayakan upah melalui pernyataan berikut:

*"Indikator upah layak menurut saya sederhana saja, yaitu apakah setelah semua kebutuhan terpenuhi masih ada sisa untuk tabungan atau tidak? Jika ada sisa setelah kebutuhan beres, barulah bisa disebut layak." (AF-09)*

Estimasi para informan berada pada rentang Rp2,5 hingga Rp4 juta untuk individu lajang di wilayah Semarang. Meskipun angka ini mendekati standar UMK, mereka sepakat bahwa standar tersebut belum memadai untuk konteks kehidupan berkeluarga. Temuan ini bersesuaian dengan data BPS (2025) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja Indonesia masih menerima upah di bawah standar minimum, dan kondisi ini menjadi lebih kritis ketika dikaitkan dengan kebutuhan keluarga.

#### **4. Peran Literasi Keuangan**

Penelitian ini menemukan bahwa literasi keuangan memberikan pengaruh dalam dua arah terhadap cara seseorang memandang upah layak. Pertama, pemahaman yang baik mendorong terciptanya pandangan yang lebih realistis. Kedua, pemahaman yang kurang memadai, terutama jika dibarengi dengan pengaruh media sosial yang kuat, dapat membuat standar kecukupan gaji menjadi tidak realistis.

Informan dengan pemahaman keuangan yang matang cenderung menilai gaji berdasarkan

hitungan kebutuhan nyata, bukan karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain. AL-03 secara tegas menyatakan keberatannya menjadikan gaya hidup di media sosial sebagai standar melalui pendapatnya di bawah ini:

*"Saya pribadi menolak kalau harus menilai cukup atau tidaknya gaji dari apa yang terlihat di media sosial. Hal itu sangat tidak akurat dan bisa merusak pandangan kita terhadap realita. Penilaian yang benar itu seharusnya fokus pada kebutuhan nyata kita, lokasi tempat tinggal, jumlah tanggungan, dan rencana masa depan. Itulah inti dari literasi keuangan." (AL-03)*

Temuan ini memperluas hasil kajian dari Herawati (2015) serta Suwatno et al. (2020) yang menunjukkan hubungan positif antara literasi keuangan dan perilaku ekonomi mahasiswa. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa literasi keuangan yang sedang dapat membuat seseorang mengalami *reference group effect* (Duesenberry, 1949), yaitu kecenderungan menetapkan standar kecukupan berdasarkan kelompok sosial di media sosial. Fenomena ini selaras dengan temuan Rohmanto & Susanti (2021) yang membuktikan bahwa *lifestyle* hedonis yang diperkuat media sosial secara signifikan memengaruhi perilaku keuangan mahasiswa ketika tidak diimbangi literasi keuangan yang memadai.

DV-10 juga menambahkan sebuah poin penting mengenai perbedaan antara masalah perilaku dan masalah sistem. DV-10 menegaskan pandangannya sebagai berikut:

*"Sering kali orang yang gajinya kecil langsung dicap tidak pintar mengatur uang, padahal kenyataannya gajinya memang di bawah kebutuhan pokok. Sebaliknya, ada orang yang gajinya besar tapi tetap merasa kurang karena memang tidak paham cara mengelola uang." (DV-10)*

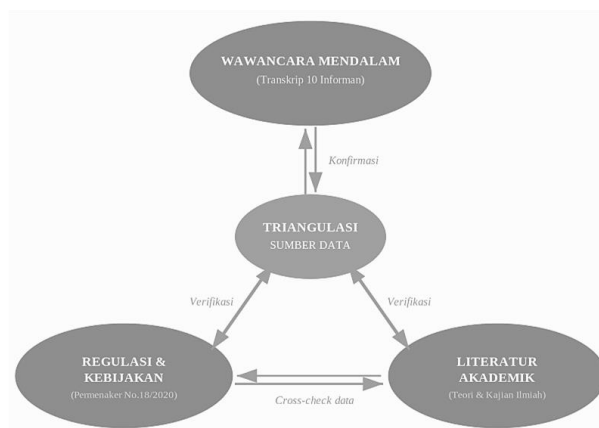
Pembedaan ini sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada memberikan edukasi keuangan saja, tetapi juga memperhatikan kenaikan upah yang memang seharusnya dilakukan secara struktural.

### **5. Triangulasi Data dan Temuan Kebaruan Penelitian**

Keabsahan temuan dalam penelitian ini diperkuat melalui teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan tiga elemen utama, yaitu (1) transkrip wawancara mendalam, (2) dokumen regulasi pengupahan, dan (3) literatur akademik. Model triangulasi ini mengacu pada modifikasi teori Denzin (1978) sebagaimana dijelaskan oleh Creswell & Poth (2018) untuk

memastikan data yang dihasilkan benar-benar valid dari berbagai sudut pandang

**Gambar 1. Model Triangulasi Sumber Data Penelitian**



Sumber: Modifikasi dari model triangulasi Denzin (1978) dalam Creswell & Poth (2018)

Triangulasi pada Gambar 1 menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat di antara ketiga sumber data tersebut. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, (2020) menetapkan bahwa Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdiri dari 64 komponen yang mencakup pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, hingga tabungan. Komponen-komponen ini ternyata muncul secara spontan dalam penjelasan para informan saat mendefinisikan makna upah layak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa Pendidikan Ekonomi telah menyerap aturan pemerintah ke dalam pola pikir mereka melalui pengalaman hidup mandiri dan pemahaman dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia.

Triangulasi juga mengungkap adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam. Para informan cenderung menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya sebagai bentuk kompromi politik yang belum sepenuhnya mencerminkan upah layak secara nyata. Pandangan kritis ini didukung oleh metodologi *living wage* dari Anker & Anker (2017) yang secara konseptual memisahkan upah minimum sebagai produk hukum dari *living wage* sebagai standar hidup ideal. Data dari BPS (2025) turut memperjelas alasan kekhawatiran para mahasiswa tersebut, di mana rata-rata pendapatan riil masyarakat di lapangan sering kali masih berada di bawah ambang batas upah minimum, yang memperlebar jarak antara aturan hukum dan kenyataan hidup layak.

Berdasarkan proses triangulasi tersebut, terdapat empat temuan kebaruan yang membedakan penelitian ini dengan kajian sebelumnya. Pertama, mahasiswa Pendidikan

Ekonomi membangun makna upah layak melampaui teks regulasi dengan cara menghubungkan teori formal dan kenyataan hidup. Kedua, literasi keuangan tidak hanya berperan dalam pengelolaan uang pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur bagi mahasiswa untuk menilai apakah sebuah upah sudah layak atau belum. Ketiga, muncul kesadaran kritis mengenai celah antara upah minimum dan upah layak yang menunjukkan potensi mahasiswa sebagai agen literasi keuangan yang mampu mengawal kebijakan pengupahan di masa depan. Keempat, media sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam memengaruhi persepsi seseorang mengenai kecukupan gaji.

Temuan-temuan ini memperkaya kajian lintas ilmu antara literasi keuangan, pendidikan ekonomi, dan konstruksi makna pengupahan. Upah layak bukan sekadar persoalan angka dan regulasi, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, nilai-nilai pribadi, pengalaman hidup mandiri, dan kondisi sosial-ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam teori Berger & Luckmann (1966) yang masih relevan hingga saat ini.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Pendidikan Ekonomi mengonstruksi makna upah layak sebagai standar kehidupan yang tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga kebutuhan sosial, pengembangan diri, dan jaminan masa depan. Konstruksi tersebut terbentuk melalui interaksi antara pengetahuan akademik, pengalaman hidup mandiri, serta tingkat literasi keuangan yang dimiliki. Literasi keuangan terbukti berperan dalam membentuk persepsi yang lebih rasional dan berbasis kebutuhan nyata, meskipun masih terdapat pengaruh eksternal seperti media sosial yang dapat menyebabkan bias persepsi. Selain itu, mahasiswa memiliki kesadaran kritis terhadap adanya kesenjangan antara upah minimum yang bersifat normatif dengan upah layak yang bersifat substantif. Dengan demikian, upah layak dipahami sebagai konstruksi sosial yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan pengalaman individu.

Institusi pendidikan, khususnya program studi Pendidikan Ekonomi, dapat memperkuat integrasi literasi keuangan dalam kurikulum secara lebih kontekstual dan aplikatif agar mahasiswa mampu membangun persepsi ekonomi yang realistis. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan pengupahan agar lebih mendekati standar kebutuhan hidup layak yang sebenarnya, tidak hanya berorientasi pada batas minimum. Bagi mahasiswa, penting untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan secara rasional dan tidak menjadikan media sosial sebagai acuan utama dalam menilai kecukupan pendapatan. Penelitian

selanjutnya disarankan untuk memperluas subjek dan konteks penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai konstruksi makna upah layak di berbagai kelompok masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anker, R., & Anker, M. (2017). *Living wages around the world: Manual for measurement*. Edward Elgar Publishing.  
<https://www.elgaronline.com/monobook-oa/9781786431455/9781786431455.xml>
- Ariska, S. N., Jusman, J., & Asriany, A. (2023). Pengaruh literasi keuangan, financial teknologi dan gaya hidup hedonisme terhadap perilaku keuangan mahasiswa. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2662–2673. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1472>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- BPS. (2025). *Keadaan pekerja di Indonesia Februari 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2025). *Statistik upah dan gaji Indonesia 2025*. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Duesenberry, J. S. (1949). *Income, saving, and the theory of consumer behavior*. Harvard University Press.
- Gultom, B. T., HS, S. R., & Siagian, L. (2022). Dampak literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa: Studi kasus di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1), 135–145.  
<https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.46896>
- Herawati, N. T. (2015). Kontribusi pembelajaran di perguruan tinggi dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 48(1–3), 60–70. <https://doi.org/10.23887/jppundiksha.v48i1-3.6919>
- Izzaty. (2013). Kebijakan penetapan upah minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 131–145. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/49>
-

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2025 (2024). <https://jdih.jatengprov.go.id>
- Keuangan, O. J., & Statistik, B. P. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.  
<https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications.
- Mulyadi, D. R., Subagio, N., & Riyadi, R. (2022). Kemampuan pengelolaan keuangan mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Mulawarman. *Educational Studies: Conference Series*, 2(1), 25–32.
- OJK, & BPS. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id>
- Oktawila, D. (2025). Implikasi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap regulasi ketenagakerjaan. *JUMIN: Jurnal Multidisiplin Ilmiah Nasional*, 4(1), 1–12.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (2020).
- Rohmanto, F., & Susanti, A. (2021). Pengaruh literasi keuangan, lifestyle hedonis, dan sikap keuangan pribadi terhadap perilaku keuangan mahasiswa. *E-Jurnal ECOBISMA*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.36897/ecobi.v8i1.2057>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suwatno, Waspada, I. P., & Mulyani, H. (2020). Meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa melalui financial literacy dan financial self efficacy. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 87–96.